

Tim Polda Jateng Gelar Test Genose

BOYOLALI (KR) - Munculnya kluster piknik di Dukuh Gondang, Desa Candi, Kecamatan Ampel mendapat perhatian jajaran Dokkes Polda Jateng. Mereka pun segera menggelar test genose dan swab antigen di dukuh tersebut, Jumat (23/4). Apalagi diketahui ada satu pasien meninggal dunia dalam perawatan di rumah sakit. Jenazahnya langsung dimakamkan di pemakaman umum dukuh setempat pada Kamis (22/4) malam dengan menerapkan prokes ketat. "Benar, satu pasien meninggal di rumah sakit, inisial N (51)," ujar Camat Ampel, Dwi Suardo. Sebenarnya, korban tidak memiliki riwayat komorbid atau penyakit penyerta. Sebenarnya tidak komorbid, namun kondisinya memang terus menurun hingga meninggal dunia. Mungkin karena yang bersangkutan ketakutan atau was-was berlebihan.

Sementara itu, kedatangan tim Dokkes Polda Jateng di Kecamatan Ampel tersebut dibantu petugas RS Bhayangkara Semarang. Sasaran tim adalah melakukan tracking bagi warga Gondang di luar kluster piknik. Puluhan warga itu pun menjalani test genose dan swab antigen serta PCR. Satu persatu warga antri dengan menerapkan protokol kesehatan. Kemudian dipanggil petugas secara urut untuk tes genose. Jika dinyatakan positif, maka yang bersangkutan diminta test swab antigen. Selanjutnya, warga tersebut wajib isolasi mandiri. Menurut Kabid Dokkes Polda Jateng, Kombes Pol dr R Harjuno, Sp KJ, pihaknya ikut turun ke Dukuh Gondang, Desa Candi guna melakukan Tracing, Testing, Treatment (3T). Pihaknya juga dibantu petugas dari RS Bhayangkara Semarang. "Target kami kegiatan 3T ini bisa menjangkau 50-100 warga," katanya. (*-1)

Evaluasi Penerapan Prokes Sebelum PTM

SEMARANG (KR) - Anggota Komisi E DPRD Jateng Jasiman, meminta Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengevaluasi penerapan protokol kesehatan (prokes) dalam Pembelajaran Tatap Muka (PTM), sebelum diterapkannya PTM di seluruh sekolah di Jateng. Jasiman mengatakan hal itu, Jumat (23/4) di Semarang. Jasiman minta agar prokes di sekolah dievaluasi terkait dengan meninggalnya tiga orang guru di SMAN 1 Gondang, Sragen, akibat Covid-19, meski sekolah tersebut bukan termasuk sekolah yang menjadi uji coba penerapan PTM di Jateng. Jasiman khawatir jika tidak dilakukan pengecatan penerapan prokes, juga penerapan PTM sesuai SKB 4 menteri tentang PTM maka kejadian serupa akan terulang. "Kasus meninggalnya tiga orang guru akibat covid tersebut harus menjadi bahan evaluasi di lingkungan pendidikan sebelum melakukan PTM secara menyeluruh," ujar Jasiman. Menurut Jasiman, PTM hanya bisa diterapkan secara utuh oleh sekolah yang telah mengikuti SKB 4 Menteri terkait penyelenggaraan pembelajaran di masa Pandemi Covid-19 dan ketat menerapkan prokes. Sebelum diberlakukan, harus dipastikan terlebih dulu semua guru, kepala sekolah, dan semua unsur tenaga pendidikan harus sudah di vaksinasi. (Bdl)

Rehabilitasi Lahan, Sarihusada Bagikan Pohon

KLATEN (KR) - Danone Specialized Nutrition (SN) Indonesia melalui PT Sarihusada Generasi Mahardhika (Sarihusada) Kemudo, Prambanan, Klaten, membagikan 5.000 bibit pohon untuk rehabilitasi hutan dan lahan. Kegiatan ditutup dengan penanaman pohon mangga, bertepatan peringatan Hari Bumi, Kamis (22/4). External Relation East

Region Danone Indonesia, Rony Rusdiansyah mengemukakan, Sarihusada telah membagikan lebih dari 5.000 bibit buah-buahan dan tanaman keras, kepada delapan Kelompok Tani Hutan di wilayah Kecamatan Bayat, dan masyarakat di Kecamatan Prambanan.

Pembagian dan penanaman bibit dimulai Februari lalu, saat curah hujan

masih tinggi. Terdiri bibit buah Mangga, Jambu Kristal, Pete, Alpukat, dan bibit pohon Sengon, Mahoni serta Beringin. Selain memiliki fungsi ekologi, tanaman tersebut juga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Operation Director Danone Specialized Nutrition Indonesia, Azmin Hasmat mengemukakan, aksi ini sebagai komitmen Sarihusada dalam menjaga kelestarian sumber daya air. "Dengan mengusung visi 'One Planet. One Health', kami berkomitmen membantu melestarikan dan memulihkan ekosistem, mengelola siklus air secara efisien, dan menyediakan akses air bersih, dan pemenuhan nutrisi masyarakat. Kesehatan planet bumi dan kesehatan kita semua saling berhubungan," kata Azmin Hasmat. (Sit)



KR-Sri Warsiti

Misbahul Munir menyerahkan penghargaan untuk Sarihusada. (Foto: K23BUMI.JPG)

MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA Unimus-Sekolah Muhammadiyah Teken MoU

SEMARANG (KR) - Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (Dikdasmen PWM) Jateng terkait pelaksanaan program Lesson Plan, Pendidikan Kolaborasi, dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) kerja sama Unimus dengan ber-

bagai sekolah Muhammadiyah se Jateng.

Penandatanganan dilakukan antara Rektor Unimus Prof Dr Masruki MPd dengan Ketua Majelis Dikdasmen Dr Iwan Junaedi MPd di kampus Unimus, Kamis sore (22/4). Pada acara yang sama dilakukan pula penandatanganan antara 4 Dekan di lingkungan Unimus (Dekan Fakultas Teknik Dr RM Bagus Irawan ST MSi IPP, Dekan Fakultas

MIPA Dr Eny Winaryati MPd, Dekan Fakultas Ekonomi Dr Khaerudin MT MM, Dekan Fakultas Bahasa dan Budaya Asing Muhimatul Ifadah MPd) dengan puluhan kepala sekolah Muhammadiyah ditandai salah satunya dengan munculnya banyak pusat unggulan di berbagai sekolah Muhammadiyah Jateng.

Rektor Unimus Prof Dr Masruki MPd menyampaikan pesatnya perkembangan yang dicapai sekolah di lingkungan Muhammadiyah ditandai salah satunya dengan munculnya banyak pusat unggulan di berbagai sekolah Muhammadiyah Jateng.

Begitu juga kurikulum pendidikan di sekolah Muhammadiyah serta sekolah di lingkungan Kemendikbud serta swasta lainnya di Indonesia. Hanya saja di area praktis saja yang perlu ditingkatkan. (Sgi)



KR-Sugeng Irianto

Rektor Unimus (kanan) dan Ketua Majelis Dikdasmen saat tanda tangan MoU.

PENGHARGAAN 'SAKIP-RB AWARD' 2020

Wonogiri Raih Predikat 'Sangat Baik'

WONOGIRI (KR) - Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali mengukir prestasi menggembirakan di bidang kinerja birokrasi. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Tjahjoe Kumolo, Kamis (22/4) lalu secara virtual menyerahkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah provinsi, kabupaten/kota tahun 2020. Salah satu penerimanya adalah Pemkab Wonogiri.

Bupati Wonogiri Joko Sutopo yang ditemui KR di kantornya usai menemui para buruh dan pekerja, Jum'at (23/4), menyampaikan bersyukur atas apresiasi yang diberikan pemerintah pusat itu.

"Bersyukur karena tahun ini kita untuk ketiga kalinya berturut-turut mendapat penghargaan SAKIP-RB Award," ujar Bupati Joko. Menurut pria yang akrab disapa Mas Jekek, di

tengah pandemi Covid 19 jajaran birokrasi Pemkab Wonogiri mampu menunjukkan kinerja dan kerja yang bagus dalam upaya memenuhi tuntutan segenap lapisan masyarakat Wonogiri dengan transparan, efektif dan efisien.

"Memang belum bisa mencapai nilai memuaskan tapi dibanding tahun lalu prestasi kita di tengah pandemi naik sedikit demi sedikit. Inilah tantangan kami di tahun-tahun mendatang agar bisa terus meningkat," kata Jekek.

Menyusul tahun ketiga penghargaan atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Wonogiri meraih kategori BB atau Sangat Baik (nilai < 70-80) diantara 66 kabupaten/kota penerima di seluruh Indonesia. Bupati Jekek berharap dengan prestasi BB yang dicapai tahun ini untuk tahun depan kabupaten ini bisa menyabet predikat sa-tu tingkat di atas-

nya yakni A (Memuaskan) dan tahun selanjutnya AA (Istimewa).

"Oleh karenanya dalam setiap kesempatan saya tidak bosan-bosan atau sungkan-sungkan terus mengajak aparaturnya Pemkab untuk melau-

kukan efisiensi anggaran, di sisi lain meningkatkan pelayanan birokrasi dengan tata kelola pemerintahan yang kredibel demi meningkatnya kesejahteraan serta perekonomian masyarakat," lanjut dia. (Dsh)



KR-Joko Santoso

Bupati Wonogiri Joko Sutopo, Wakil Bupati Setyo Sukarno dan Ketua DPRD Sriyono dalam suatu acara bersama eksekutif dan legislatif.

PERSOALAN ASET KANTOR WALIKOTA MAGELANG

Walikota-Akml Berkomitmen Selesaikan Bersama

MAGELANG (KR) - Persoalan aset Kantor Walikota Magelang, tidak ingin persoalannya menjadi polemik pada pimpinan Kota Magelang berikutnya. Walikota Magelang berkomitmen akan menyelesaikan persoalan aset kantor tersebut bersama Akademi TNI/Akml.

Dalam siaran pers, Jumat (23/4) disebutkan Walikota Magelang dr H Muchamad Nur Aziz SpPD mengungkapkan hal ini saat menerima Wakil Komandan Jenderal (Wakil Danjen) Akademi TNI Marsda TNI Sri Pulung D dan rombongan di Ruang Sidang lantai 2 Kantor Walikota Magelang, Kamis (22/4) lalu.

"Saya ingin ini selesai, agar tidak jadi beban pemimpin setelah saya. Saya juga tidak ingin persoalan ini berlarut-larut," kata Walikota Magelang. Walikota Ma-

gelang mengatakan persoalan tersebut sudah dibahas, meskipun belum intens sejak dirinya dilantik menjadi Walikota Magelang, Bulan Februari 2021 lalu. Namun pandemi Covid-19 yang belum juga usai berdampak pada konsentrasi dan prioritas program-programnya.

"Bukan menyalahkan Covid-19, tetapi Covid-19 membuat kita berpikir ulang bahwa manusia harus pasrah pada Allah," kata Walikota Magelang.

Pihaknya juga tidak menyalahkan pemimpin-pemimpin sebe-

lumnya yang telah menyepakati pemakaian aset milik Akabri ini untuk dipakai pemerintahan Kota Magelang. Semua ada dasar yang benar, meskipun belum terselesaikan para pendahulu.

Pemerintah Kota Magelang akan kembali ke 'titik nol' menyelesaikan permasalahan ini. "Ini serius, kita akan selesaikan. Mudah-mudahan kedepan lebih baik. Termasuk apa keputusan pada Mei nanti, saya akan beri alternatif," tuturnya.

Sementara itu Wakil Komandan Jenderal TNI Marsda TNI Sri Pulung D menyampaikan pada Bulan Agustus 2021 mendatang Pendidikan Dasar Keprajuritan Taruna Akademi TNI dan Polri akan dimulai di Magelang, dan program ini berlangsung setiap tahun.

Sedikitnya 1.000 orang prajurit mengikuti pendidikan ini. Kegiatan-kegiatan yang diadakan TNI di suatu daerah akan berdampak pada perputaran ekonomi yang tinggi di daerah tersebut.

Seperti ketika pihaknya menggelar latihan bersama dengan militer Singapura di Madiun selama sebulan. Saat itu, PAD Madiun mengalami kenaikan.

"Maka kami harapkan kerja samanya, sehingga pemda mendapatkan manfaat yang besar dari kerjasama itu, sehingga Indonesia bisa terbangun dengan baik dan sejahtera," katanya.

Wakil Danjen Akademi TNI juga menyampaikan persoalan aset ini diharapkan segera menemui titik temu pada masa pemerintahan Walikota dr Muchamad Nur Aziz. (Tha)



DPRD Kabupaten Magelang Minta Pemkab Maksimalkan Pendapatan

MAGELANG (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang meminta agar adanya pandemi Covid 19 jangan sampai menjadikan Pemerintah Kabupaten Magelang pesimis dalam merencanakan target Pendapatan Asli Daerah. "Karena selama ini masih banyak potensi-potensi pendapatan yang belum dioptimalkan pencapaiannya, baik itu diapa daerah maupun retribusi daerah," kata Juru Bicara Komisi 1 DPRD Kabupaten Magelang, Arifah Apriliani saat menyampaikan pandangan Komisi I dalam Sidang Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, Kamis (22/4).

Arifah Apriliani mencontohkan salah satunya belum optimalnya penarikan pajak hotel dan restoran, pajak bahan galian golongan C, pajak parkir. Beberapa upaya telah dilakukan daerah lain yang bisa dijadikan contoh seperti misalnya pemasangan Tapping Box di semua hotel dan restoran serta pemasangan alat pembayaran elektronik yang dipasang di pasar-pasar guna pembayaran retribusi pasar menggunakan e-money.

Hal ini dinilai akan mengurangi tingkat kebocoran sektor pendapatan. Untuk pemasangan alat tentunya membutuhkan biaya yang besar, namun bisa dikerjasamakan dengan pihak perbankan sehingga tidak terlalu membebani APBD kita. Selain itu perlu ada pemantauan terus menerus dan penindakan tegas kepada truk-truk pasir agar masuk di Pos Pemungutan pajak dan jangan ada pembiaran yang akan berdampak banyaknya truk pengangkut pasir yang tidak membayar pajak galian golongan C.

"Pemerintah daerah hendaknya mampu menggali potensi pendapatan selain pajak dan retribusi daerah, seperti halnya mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik daerah baik berupa tanah maupun bangunan sehingga bisa ikut dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya melakukan renegosiasi atas sewa tanah, meningkatkan fasilitas bangunan," jelasnya.

Komisi II menyoroti adanya perubahan RPJMD Kab Magelang Tahun 2019-2024, diharapkan perencanaan pembangunan ke depan bisa mendorong pada upaya percepatan pemulihan ekonomi masyarakat. "Pengembangan sektor unggulan Kabupaten Magelang, yaitu sektor pertanian, pariwisata & UMKM kiranya harus mendapat perhatian yg lebih serius, mengingat sektor tersebut yang selama ini memberikan kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang justru menjadi sektor yang paling terdampak," kata Juru Bicara Komisi II, Supardi.

Juru Bicara Komisi III Nurcholis, mengatakan Kabupaten Magelang masuk dalam kawasan Purwomanggung (Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Temanggung) dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. "Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, perlu strategi penguatan konektivitas yang mampu menghubungkan infrastruktur dengan sentra produksi ekonomi," katanya.

Adapun Juru Bicara Komisi IV Edi Gunawan Yakti mengatakan walaupun APBD tidak sebesar dalam situasi normal, Komisi IV mendorong fokus pertumbuhan ekonomi dan pendapatan tetap dikejar dan optimis tercapai. Serta program-program yang dilaksanakan diharapkan untuk peme-

rataan pendapatan ekonomi masyarakat.

Bupati Magelang Zaenal Arifin mengatakan pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan besar yang menuntut kebiasaan baru di berbagai sektor. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19, serta efek yang ditimbulkan di berbagai sektor kehidupan, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah. "Sehingga menjadi hal penting untuk dilakukan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024," katanya.

Zaenal Arifin berharap perubahan yang dilakukan ini akan mampu mempertajam dan menguatkan upaya dalam pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yaitu Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (SEDAYAAMANAH). Rapat paripurna kali ini menjadi pertama kalinya digelar secara tatap muka oleh semua peserta yang terdiri Ketua DPRD Kabupaten Magelang Saryan Adiyanto beserta jajaran pimpinan dan anggotanya, Bupati Magelang serta para pimpinan SKPD, di Gedung DPRD setempat. (Adv)



KR-Bagyo Harsono

Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Magelang, setuju Nota Kesepakatan Rancangan Awal Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.